

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat terselesaikan.

Berdasarkan Perbup Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2018 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan harapan majunya masyarakat Rembang pada umumnya dan lebih khusus terselenggaranya sistem komunikasi dan informatika yang handal melalui pengelolaan yang profesional guna menunjang kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Rembang sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas harus disertai dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas selesainya rencana kerja (Renja) ini, semoga mendapat Rahmat Tuhan yang maha kuasa, Amin.

Rembang, 28 Juni 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Rembang

**Ir. WARTONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600110 199103 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2017-2021.....	9
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	14
2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kejiata Masyarakat.....	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG....	16
3.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.....	16
3.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang.....	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	21
BAB V PENUTUP.....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target dan Capaian Indikator Program Urusan Dinkominfo Tahun 2018-2019.....	10
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014-2018.....	12
Tabel 2.3	Tujuan, dan Sasaran, Indikator Sasaran Tahun 2020-2021.....	13
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah Tahun 2020-2021.....	17
Tabel 3.2	Strategi dan Kebijakan.....	20
Tabel 4.1	Ranwal RKPD dan Hasil KUA PPAS.....	21
Tabel 4.2	Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan.....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2019 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2019. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastruktur IT, sumber daya manusia IT, *single data system* sesuai dengan potensi sumber daya tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.

Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian menjadi sektor andalan Dinas Kominfo Kabupaten Rembang. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Kominfo, Persandian dan Statistik Tahun 2020.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kominfo, Persandian dan Statistik Tahun 2020.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun Anggaran 2020.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Kominfo, Persandian dan Statistik antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang mengacu sistematika sebagaimana termuat di dalam Permendagri 86 tahun 2017 pada Lampiran VI, yaitu sebagai berikut:

- BAB I   Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II   Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfo Tahun Lalu
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2018 dan 2019
  - 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
  - 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.4 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III   Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Renja Dinkominfo 2020
  - 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo
  - 3.2 Strategi dan Kebijakan Dinkominfo
- BAB IV   Rencana Kerja Pendanaan
- BAB V   Penutup

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2017-2021.**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sasaran. Pada tahun anggaran 2019 total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sejumlah Rp.8.042.507.728,- dari jumlah anggaran tersebut, alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.612.710.728,- dan Belanja langsung sebesar Rp.5.429.797.000. Jumlah dana tersebut digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari program dan kegiatan. Dari total alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dana yang terserap untuk membiayai Belanja Langsung dan tidak langsung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.4.864.484.000,- atau sebesar 97,93%. Besaran serapan tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.2.452.484.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.2.412.000.000,-

Total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Pada Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp.8.042.507.728,- Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.612.710.728,- dan Belanja langsung sebesar Rp.5.429.797.000,-. Total anggaran meliputi 10 Program dan 49 Kegiatan. Dari total alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dana yang terserap untuk membiayai Belanja Langsung dan tidak langsung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 4.864.484.000,- atau sebesar 97,93%.

Dan capaian kinerja selama tahun yang berlalu akan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat target dan capaian kinerja untuk urusan Bidang Komunikasi dan Informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Target dan Capaian Indikator Program Urusan Dinas Komunikasi dan**  
**Informatika Tahun 2018-2019**

OPD	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				2018		2019	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp
	2	3	4	5	6	7	8
DINKOMINFO	Urusan Komunikasi dan Informatika				491,331,420		546,786,552
DINKOMINFO	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa				397,744,483		442,636,732
DINKOMINFO		Persentase peningkatan update konten pada website www.rembangkab.go.id	%	94		96	
DINKOMINFO		Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	%	65		70	
DINKOMINFO		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet	%	100		100	
DINKOMINFO		Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	%	90		100	
DINKOMINFO		Persentase PD telah memiliki website (%)	%	100		100	
DINKOMINFO		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	%	30		35	
DINKOMINFO	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi				93,586,937		104,149,819
DINKOMINFO		Cakupan pengawasan menara BTS	Nilai	160		165	
DINKOMINFO	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi				300,000,000		333,860,117
DINKOMINFO		Presentase Layanan Publik berbasis TIK	%	60		65	
DINKOMINFO		persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	%	60		80	
DINKOMINFO		persentase interkoneksi internet dan jaringan intranet kabupaten, kecamatan, desa dan perangkat daerah	%	50		55	
DINKOMINFO		persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	%	100		100	
DINKOMINFO	Program kerjasama informasi dan media massa				250,000,000		278,216,764
DINKOMINFO		Rata-rata berita yang dipublikasikan tiap bulan	%	37		40	
DINKOMINFO		persentase expo skala nasional yang diikuti dalam satu tahun	%	100		100	
DINKOMINFO	Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi				350,000,000		389,503,470

OPD	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				2018		2019	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp
	2	3	4	5	6	7	8
DINKOMINFO		persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi TIK	%	40		45	
DINKOMINFO	<b>Urusan Statistik</b>				<b>467,934,686</b>		<b>520,749,097</b>
DINKOMINFO	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				467,934,686		520,749,097
DINKOMINFO		Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	92		95	
DINKOMINFO		persentase publikasi dokumen Rembang Dalam Angka yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100	
DINKOMINFO		persentase publikasi dokumen NTP yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100	
DINKOMINFO		persentase publikasi dokumen PDRB sektoral tingkat kecamatan yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100	
DINKOMINFO		persentase publikasi dokumen statistik kemiskinan, kependudukan, pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100	
DINKOMINFO	<b>Urusan Persandian</b>				<b>472,179,209</b>		<b>525,472,687</b>
DINKOMINFO	Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah				472,179,209		525,472,687
DINKOMINFO		persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	%	100		100	

Gambaran kinerja Dinkominfo tiga tahun sebelumnya (2014, 2015, 2017) diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinhubkominfo Kab.Rembang, mengingat Dinkominfo Kabupaten Rembang adalah SKPD yang baru dibentuk. Gambaran kinerja tersebut adalah untuk memberikan evaluasi Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra Dinkominfo sampai dengan Tahun 2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 untuk capaian Renstra (Per Urusan dan Per Program) dan tabel 2 untuk capaian realisasi anggaran.

**2.1.1 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang**

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018**

No.	Indikator	Capaian Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
I						
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	29	58	62	62	165
2	Jumlah Penyiaran Radio	14	14	14	14	14
3	Cakupan Layanan SST	5.500	5.500	5.500	5.450	5.500
4	Jumlah aplikasi e - government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	15	20	20	20	22
5	Persentase PD telah memiliki website ( % )	86,97	86,97	100	100	100
6	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	21	21	21	21	21
II	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :					
1	Media Massa seperti majalah, radio dan televisi;	14	14	14	14	14
2	Media baru seperti website (media online)	1	1	1	1	1
3	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1	1	1	1	1
4	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya; dan / atau	-	-		-	-
5	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	2	2	2	2	2
III						
1	Cakupan Pengawasan menara BTS di Kabupaten Rembang	135	131	148	156	161
2	Jumlah prosentase pengawasan radio siaran dan radio Komunikasi	100	100	100	100	100

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran, Indikator Sasaran**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh	Nilai Sakip OPD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP (formulasi : jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)
2	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.	Nilai keterbukaan informasi publik (formulasi diukur oleh kominfo)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan E-Government.</li> <li>- Meningkatkan pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks SPBE</li> <li>- Skor KIP (Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)</li> </ul>
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya ketersediaan data statistik.	Persentase pelayanan informasi publik cepat tanggap dan transparan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya keamanan persandian daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Dengan Formulasi Skor responden : Skor Maksimal X 100 %

## **2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Rembang dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang yaitu :

Belum optimalnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh.

1. Belum optimalnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam pelayanan komunikasi dan informasi.

## **2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

### **2.3.1. Identifikasi Program/Kegiatan Yang Tercantum Rancangan Awal RKPD.**

Hasil identifikasi dari program/kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang semua telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

### **2.3.2. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan.**

Dari hasil pencermatan internal terdapat adanya perbedaan antara anggaran yang diusulkan (ideal) dengan anggaran pada rancangan RKPD. Walaupun adanya efisiensi anggaran tetapi tidak mengurangi target berdasarkan hasil pembahasan perencanaan kerja.

## **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Proses perencanaan atau *planning* adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat,

swasta serta pemangku kepentingan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Rembang terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kabupaten Rembang yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Terkait usulan sektoral Kabupaten Rembang yaitu program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan kegiatan akses internet dan jaringan interkoneksi pendukung Jateng Online bagi seluruh SKPD Provinsi, usulan senilai Rp.3.000.000.000,- dengan output kegiatan terwujudnya jaringan internet dengan menggunakan fiber optik di Kabupaten Rembang tidak dapat kami akomodir melalui program/kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang tahun 2018, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila usulan dimasukan melalui mekanisme usulan bantuan keuangan yang nantinya akan diputuskan oleh TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG**

**3.1 Tujuan, Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang**

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Rembang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2016 – 2021 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui tujuh misi, maka dalam rangka mendukung visi misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sebagai satuan kerja yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi yang telah ditetapkan, pada tahun 2016-2021 terdapat tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

**3.1.1 Tujuan OPD**

Adapun yang ditetapkan dalam strategi ataupun upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna menunjang keberhasilan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang antara lain:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh
2. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi

**3.1.2 Indikator Tujuan OPD**

Indikator sasaran yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan diatas antara lain:

1. Nilai Sakip OPD
2. Indeks kepuasan masyarakat
3. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi

**3.1.2 Sasaran OPD**

Sasaran yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan diatas antara lain:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan E-Government.
4. Meningkatnya pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan.
5. Meningkatnya ketersediaan data statistik.
6. Meningkatnya keamanan persandian daerah

### 3.1.3 Indikator Sasaran OPD

Indikator sasaran yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan diatas antara lain:

1. Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP (formulasi : jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)
2. Nilai keterbukaan informasi publik (formulasi diukur oleh kominfo)
3. Indeks SPBE
4. Skor KIP (Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)  
(Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)
5. Persentase pelayanan informasi publik cepat tanggap dan transparan
6. Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan Formulasi Skor responden : Skor Maksimal X 100 %

**Tabel 3.1**  
**Tujuan , Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh	Nilai Sakip OPD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP (formulasi : jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)
2	Meningkatkan pelayanan dalam	Indeks kepuasan	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai keterbukaan informasi publik

	penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat	masyarakat	kinerja dan kualitas pelayanan publik.	(formulasi diukur oleh kominfo)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	- Meningkatkan E-Government. - Meningkatnya pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan	- Indeks SPBE  - Skor KIP (Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya ketersediaan data statistik.	Persentase pelayanan informasi publik cepat tanggap dan transparan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya keamanan persandian daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Dengan Formulasi Skor responden : Skor Maksimal X 100 %

## **3.2 Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika**

### **3.2.1 Strategi**

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang perlu faktor pendukung yang merupakan nilai-nilai strategis yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas kewenangan dinas sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Peningkatan sistem pelayanan publik dan penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi
3. Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi

### **3.2.2 Arah Kebijakan**

1. Peningkatan kualitas dan sistem perencanaan kinerja yang matang
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang informasi dan telekomunikasi secara berkelanjutan tuntutan kemajuan teknologi

**Tabel 3.2**  
**Tabel Strategi dan Kebijakan**

No	Tujuan OPD	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dan sistem perencanaan kinerja yang matang
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Pengelolaan sistem pelayanan publik dan penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang informasi dan telekomunikasi secara berkelanjutan tuntutan kemajuan teknologi

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2020 mengusulkan rancangan awal dan hasil yang disetujui KUA/PPAS sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Usulan Ranwal RKPD dan Hasil KUA PPAS**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Ranwal RKPD</b>	<b>KUA PPAS</b>
1	Pendapatan	Rp. 362,000,000	Rp. 362,000,000
2	Belanja tidak langsung	Rp. 2,582,382,000	Rp. 2,582,382,000
3	Belanja langsung	Rp. 7,408,700,000	Rp. 4,508,700,000
<b>Total</b>		<b>Rp. 9,991,082,000</b>	<b>Rp. 7,091,082,000</b>

Selanjutnya Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertera dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	
<b>2.10.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>4,508,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>4,508,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>210</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>				<b>3,958,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>210.7</b>	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian pelayanan umum Presentase Ketercakupan Sarana Prasarana Aparatr Presentase Ketercapaian Pelayanan Kepegawaian Presentase Ketercapaian Pelayanan Keuangan	<b>Kabupaten Rembang</b>	90.00 % 90.00 % 90.00 % 90.00 %	<b>1,270,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
210.7.1	<b>Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum</b>	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Dinkominfo	100.00 %	<b>1,068,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat di Dinkominfo</i>			<i>12 bulan</i>	<i>1,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U) <i>Tersedianya perangkat dan materai</i>
	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>			<i>12 bulan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U) <i>Pembelian ATK</i>
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			<i>12 bulan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U) <i>Fotocopy dan penggandaan</i>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	banner hari-hari tertentu
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Langganan koran
	Penyediaan makanan dan minuman			12 bulan	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	makan minum rapat rutin
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12 bulan	130,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	perjalanan dinas keluar daerah
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah			12 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perjalanan dinas dalam daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12 bulan	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peralatan rumah tangga dan alat kebersihan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	490,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembayaran listrik, jasa komunikasi dan internet
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			12 bulan	160,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honor Penatausahaan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pembelian alat listrik, lampu, kabel, dan instalasi listrik
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan			12 bulan	191,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Honor THL, dan ATK serta fotocopy
210.7.2	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Dinkominfo	100.00	<b>147,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Pengadaan kendaraan dinas roda dua Dinkominfo			5 Unit	72,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	pengadaan kendaraan dinas roda dua

	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di Dinkominfo</i>			<i>12 bulan</i>	<i>30,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Perawatan mobil dan sepeda motor</i>
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor di Dinkominfo</i>			<i>12 bulan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga plitur dan cat meja kursi</i>
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor di Dinkominfo</i>			<i>12 bulan</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga</i>
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>			<i>12 bulan</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Perawatan gedung</i>
	<i>Pengadaan perlengkapan kantor</i>			<i>100 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pengadaan meubel,meja kursi staf, Almari Kadin dan Sekdin</i>
	<i>Rehab Gedung Kantor</i>			<i>100 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pembangunan tempat parkir, pembangunan partisi kantor, KM Kadin</i>
210.7.3	<b>Peningkatan kualitas sumber daya aparatur</b>	Persentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Dinkominfo	100.00 %	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>Pengiriman diklat di Dinkominfo</i>			<i>12 Paket</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	
	<i>Pembinaan Rohani</i>			<i>12 bulan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pembinaan rohani</i>
	<i>Peningkatan maturitas SPIP OPD</i>			<i>100 %</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan maturitas SPIP OPD</i>

210.7.4	<b>Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan</b>	Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP (Formulasi : Jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)	Kabupaten Rembang	100.00 %	45,000,000	0	0		
	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>			1 Dokumen	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dokumen laporan kinerja OPD
	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>			1 Dokumen	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dokumen Laporan Keuangan
	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>			1 Dokumen	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dokumen Monev
	<i>Penatausahaan Aset Barang Milik Daerah</i>			12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Penatausahaan aset
210.8	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Rembang	65.00 %	40,000,000	0	0		
210.8.1	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	Kab. Rembang	100.00 %	30,000,000	0	0		
	<i>Penyusunan Renstra, Renja</i>			02 Kegiatan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	
210.8.2	<b>Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	Jumlah capaian indikator kinerja Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	Kab. Rembang	100.00 % 100.00 %	10,000,000	0	0		
	<i>Penyusunan LKIP dan LPPD</i>			01 Kegiatan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	

210.9	<b>Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik</b>	Persentase Informasi yang disampaikan ke publik (jumlah informasi yang disampaikan publik : jumlah informasi publik yg wajib disampaikan)	<b>Kabupaten Rembang</b>	100.00 %	10,000,000	0	0		
210.9.1	<b>Pengelolaan keterbukaan informasi publik</b>	Prosentase keterapaian perencanaan danevaluasi kinerja SAKIP (Formulasi : Jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)  Prosentase keterapaian perencanaan danevaluasi kinerja SAKIP (Formulasi : Jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)	Kabupaten Rembang	100.00 % 100.00 %	10,000,000	0	0		
	<i>Pengelolaan informasi Publik di Dinkominfo</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja sakip</i>
210.71	<b>Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik</b>	Persentase OPD yang menyajikan data dengan lengkap	<b>Dinkominfo Kabupaten Rembang</b>	100.00 %	535,000,000	0	0		
210.71.1	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi</b>	Jumlah Informasi dan dokumentasi yang terkelola	Kabupaten Rembang	39.00 OPD	405,000,000	0	0		
	<i>Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>			<i>6 bulan</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>rembang expo, karnaval</i>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana
	<i>Pengelolaan Informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik</i>			12 bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>honor, layanan informasi, rakor</i>
	<i>Pengembangan dan Pengelolaan website</i>			12 bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>admin, rapat monev, dan bintek</i>
	<i>Penyelenggaraan Layanan Aduan Masyarakat</i>			12 bulan	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>honor set, rapat evaluasi</i>
	<i>Pengawasan dan Pembinaan Radio Siaran</i>			10 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>monitoring dan pengawasan</i>
	<i>Pengawasan dan Pengendalian Menara</i>			12 bulan	65,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>perjalanan dinas, buku deroktori menara</i>
	<i>Layanan monitoring isu publik media</i>			12 bulan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>pengadaan jasa analisis media</i>
210.71.4	<b>Pembinaan Layanan Kehumasan</b>	Jumlah OPD yang dibina Jumlah Forum Komunikasi Publik Kemasyarakatan yang dibina	Kabupaten Rembang	39.00 OPD 30.00 Binaan	<b>130,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>Pembentukan/Pemberdayaan BAKO HUMAS/Forum Kehumasan</i>			10 bulan	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>pembekalan, rapat koordinasi</i>
	<i>Pengembangan dan Pemberdayaan KIM dan FK Metra</i>			12 bulan	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>lomba 2 kali, penampilan 1 kali, bintek KIM 1 kali, rakor</i>
	<i>Pengembangan SDM Komunikasi dan Kehumasan</i>			11 bulan	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Bintek OPD</i>
<b>210.72</b>	<b>Program Pengembangan E-Government</b>	Prosentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi	<b>Kab. Rembang</b>	2.75 skor	<b>2,103,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana
210.72.1	<b>Pengembangan dan Optimalisasi pengelolaan E-Government</b>	Jumlah Layanan tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Kab. Rembang	2.75 skor	<b>1,658,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi</i>			<i>1 paket</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pelaksanaan sosialisasi internet sehat</i>
	<i>Pemeliharaan Jaringan &amp; Menara WaveLAN</i>			<i>1 paket</i>	<i>180,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pemeliharaan jaringan dan menara Wave LAN seluruh OPD se-Kabupaten Rembang</i>
	<i>Pemeliharaan Jaringan FO</i>			<i>1 paket</i>	<i>100,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Memelihara jaringan FO masing masing OPD se Kabupaten Rembang</i>
	<i>Pengembangan Data center</i>			<i>1 paket</i>	<i>100,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Mengembangkan ruang data center yang sudah ada agar terstandart</i>
	<i>Pengadaan Server</i>			<i>1 paket</i>	<i>350,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pengadaan server untuk menunjang SPBE</i>
	<i>Pelatihan SDM Komunikasi &amp; Informasi</i>			<i>1 paket</i>	<i>25,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan kompetensi SDM dibidang IT</i>
	<i>Fasilitasi Pengadaan Sarpras TI Kejaksaan Negeri Rembang</i>			<i>1 paket</i>	<i>553,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Usulan Proposal Kejaksaan Negeri Rembang</i>
	<i>Pengadaan mesin absensi retina mata</i>			<i>1 Paket</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>P2</i>

	<i>Fasilitasi Pengadaan Sarpras TI Pengadilan Agama Rembang</i>			1 Paket	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Fasilitasi Sarpras PC Komputer/Dek stop</i>
	<i>Pengadaan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Rembang</i>			1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	P2
	<i>Penyusunan dan pengembangan aplikasi pemerintah daerah</i>		- Kec. Rembang	01 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	diterima
210.72.2	<b>Pengelolaan dan pengembangan data elektronik</b>	pemanfaatan data elektronik untuk SPBE	Kab. Rembang	50.00 %	<b>445,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>Fasilitasi SPBE</i>			1 paket	225,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Fasilitasi penilaian SPBE oleh pusat (Kemenpan)</i>
	<i>Pengelolaan Single Data System (SDS) &amp; Rembang Dashboard</i>			1 paket	100,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Mewujudkan integrasi data antar aplikasi pemerintah Kabupaten</i>
	<i>Pengelolaan &amp; Pemeliharaan Web Server &amp; Database Server</i>			1 paket	120,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Penyusunan / Pembangunan security &amp; firewall</i>
<b>214</b>	<b>Urusan Statistik</b>				<b>375,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>214.71</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersusun	<b>Kab. Rembang</b>	90.00 %	<b>375,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
214.71.1	<b>Penyusunan Data Statistik</b>	Jumlah OPD yang berkontribusi dalam sistem satu data	Kab. Rembang	4.00 OPD	<b>375,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>Pengelolaan Opendata</i>			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Opendata dan sinkronisasi data statistik dengan provinsi</i>
	<i>Publikasi Stastisik Dasar (BPS)</i>			1 paket	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Persediaan dokumen statistik dasar oleh BPS</i>

	<i>Pengelolaan Statistik Sektoral Strategis</i>			<i>1 paket</i>	<i>175,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Penyediaan data statistik sektoral untuk pelaksanaan perencanaan / evaluasi Pemkab (Sinergi)</i>
	<i>Peningkatan Kapasitas Pengelola statistik sektoral</i>		<i>- Kec. Rembang</i>	<i>01 paket</i>	<i>100,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Diterima</i>
<b>215</b>	<b>Urusan Persandian</b>				<b>175,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>215.71</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah</b>	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	<b>Kab. Rembang</b>	100.00 %	<b>175,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
215.71.1	<b>Pengelolaan persandian daerah</b>	Indeks KAMI	Kab. Rembang	100.00 %	<b>175,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>Pengelolaan persandian &amp; Keamanan informasi</i>			<i>1 paket</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Memonitoring pesawat Right di seluruh kecamatan</i>
	<i>Fasilitasi KAMI</i>			<i>1 paket</i>	<i>75,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Penilaian mandiri keamanan informasi Kabupaten Rembang</i>
	<i>Pengadaan alat studio &amp; Komunikasi</i>			<i>1 paket</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Pengadaan pesawat right untuk Kecamatan</i>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2020, didasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2020, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Perubahan Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021, dan berbagai kebijakan umum pembangunan kominfo, persandian dan statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Kabupaten Rembang Berbasis Elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Diharapkan melalui renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang semakin komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat semakin terfokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.